



KETERLIBATAN INSTANSI LAIN BELUM MENDESAK PPDB Zonasi Butuh Sejumlah Penyempurnaan

YOGYA (KR) - Adanya usulan agar Kemendikbud mengintensifkan kerja sama dengan Kemendagri dalam perubahan skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi, sebenarnya cukup baik. Kendati demikian, hal tersebut dinilai belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Karena dengan berbagai evaluasi, Kemendikbud diyakini masih bisa menyelesaikan berbagai persoalan dalam sistem zonasi.

"Kalau saya optimis dengan berbagai evaluasi yang dilakukan dan adanya sejumlah penyempurnaan. Kemendikbud bisa mengatasi persoalan PPDB termasuk soal zonasi tanpa harus melibatkan instansi lain. Tentu Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dituntut harus terus belajar untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat yang terkait dengan pendidikan," terang Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Ariswan kepada KR di Yogyakarta, Jumat (28/9).

Ariswan mengatakan, PPDB sistem zonasi yang

mulai diterapkan di wilayah, termasuk dinas pendidikan Kota Yogya jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pengaduan kasus PPDB oleh masyarakat hampir tidak ada. Kalau masih terjadi persoalannya lebih disebabkan karena pemerataan sekolah negeri yang belum merata.

Hal tersebut pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai solusinya, tahun depan perlu ada peningkatan tingkat pemerataan sekolah di setiap kawasan. Sehingga penyebaran siswa bisa lebih

merata dan tidak ada yang merasa dirugikan.

"Teknologi informasi sekarang ini sudah bisa menjawab hampir setiap persoalan yang terkait dengan zonasi. Persoalan utama zonasi itu satu variabel yaitu jarak titik tempat tinggal calon siswa ke sekolah. Hal ini sangat mudah diakses oleh warga masyarakat dengan piranti komunikasi mereka yaitu HP dan media lain," terangnya.

Sebelumnya pengamat Pendidikan sekaligus Direktur Utama Eduspec Indonesia Indra Charismiadji mengusulkan agar Kemendikbud menginten-

sifikan kerja sama dengan Kemendagri dalam program zonasi. Karena yang memiliki kewenangan mengontrol Pemda adalah Kemendagri. Implementasi zonasi kan di Pemda dan Pemda kontrolnya ada di Kemendagri kan," kata Indra.

Indra mengatakan, zonasi memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menghilangkan kastanisasi di semua sekolah negeri di Indonesia. Karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah mesti merancang pedoman PPDB yang bisa memaksa Pemda untuk mengimplemen-

tasikannya. "Pemda mau tidak daerah itu melakukan dan paham tidak dengan tujuan itu? Karena kalau kita lihat lagi daerah memiliki banyak kepentingan," kata Indra. (Ria/Ati)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005